

B u l e t i n



PARLEMENTARIA

KETUA
Tanggapi
Nota
Diplomatik
Saudi

Tinjau Kesiapan Infrastruktur Pelabuhan

KORPOLKAM
Pos Dubes
Strategis Masih
Kosong

Nomor 1348/III/VI/2025 Juni 2025



9 772614 339005



Tinjau Kesiapan Infrastruktur Pelabuhan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bahwa pihaknya memfokuskan peninjauan terhadap kondisi infrastruktur dan transportasi strategis saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Rangkaian kegiatan dimulai dari kunjungan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Anwar Hafid.

“Tentu kita ingin, supaya aktivitas masyarakat Palu bisa kembali normal seperti sebelumnya. Kita melihat masih ada ratusan keluarga korban bencana 2018

yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), terutama di Palu, Donggala, dan Sigi. Kita terus mendorong agar infrastruktur yang ada saat ini harus lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tegasnya di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/6).

Kemudian terkait infrastruktur, ia sepakat dengan paparan Anwar Hafid selaku Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu inisiatif kolaborasi dengan pihak industri. Seperti perbaikan jalan nasional yang dilalui oleh kendaraan operasional perusahaan besar. Salah satu yang sudah diterapkan ialah skema kerja sama dengan PT IMIP.

“Jika industri ikut andil dalam memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka

pemerintah bisa lebih fokus dalam menangani wilayah lain yang juga butuh perhatian lebih,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan Komisi V DPR RI datang kota Palu ini untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. “Kita akan sampaikan kepada mitra kerja kami. Mumpung kami rapatkan hari ini bersama, segala kebutuhan diharapkan bisa terselesaikan dan kami tangkap segala aspirasi masyarakat yang ada di Kota Palu ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menekankan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat bisa mempercepat penyelesaian persoalan ini. “Dikarenakan hal ini membutuhkan inventarisir pemasaran yang ada dari daerah setempat. Keberadaan Bapak Gubernur saat ini tentunya membuka akses komunikasi yang cukup baik dengan Komisi V DPR RI. Sehingga kita bisa memaksimalkan lagi bentuk bantuan yang nantinya kita berikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah ini,” tutupnya. — **dip/rdn**



FOTO: DIP/ANA



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama tim meninjau infrastruktur di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/6/2025).

Tanggapi Nota Diplomatik Saudi



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius nota diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia terkait sejumlah temuan kesalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Puan menyatakan bahwa sebagian besar persoalan yang disorot dalam nota tersebut sebenarnya telah ditangani pemerintah sejak jauh hari.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” jelas Puan dalam konferensi pers usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Pembukaan Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap memerlukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar masalah serupa tidak kembali terjadi di tahun-tahun mendatang.

“Dalam pelaksanaan haji kali ini, banyak hal yang harus kita evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan tidak akan terulang seperti tahun ini,” ujar Puan.

we/aha



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danurtito, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Dewi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purinho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moernoponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2025).

Pos Dubes Strategis Masih Kosong

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti sejumlah posisi penting duta besar Indonesia yang hingga kini masih belum terisi. Pos-pos tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Duta Besar RI untuk Jerman.

Menurut Dasco, pihaknya

telah menerima informasi dari pemerintah bahwa nama-nama calon dubes untuk pos-pos strategis tersebut sudah dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan diajukan secara resmi ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos dubes penting itu orangnya sudah siap dan namanya juga sudah siap dikirim ke DPR," ujar Dasco

di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Meski belum menerima nama-nama secara resmi, Dasco memastikan DPR RI akan segera menindaklanjuti proses sesuai ketentuan yang berlaku setelah ada pengajuan resmi dari pemerintah. "Namanya sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah," imbuhnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa posisi-posisi dubes yang masih kosong itu memiliki peran strategis dalam mewakili kepentingan diplomasi Indonesia di kancah global. Karena itu, para calon yang diajukan harus memenuhi sejumlah kualifikasi penting yang akan digali lebih dalam oleh Komisi I DPR RI saat uji kelayakan. **rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pentingnya Penguasaan Teknologi Terkini



Foto: Azk/Pdt

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Karsa Nusantara 2025 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan pentingnya penguasaan teknologi terkini oleh generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menghadapi era *Society 5.0*. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Karsa Nusantara 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/6).

"Ini seminar yang sangat baik untuk memperkenalkan kepada mahasiswa bahwa kita telah memasuki era baru, yaitu *Society 5.0*. Di mana kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital menjadi elemen utama dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi ini harus benar-benar dimanfaatkan secara positif oleh adik-adik mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran mereka," ucap Adies.

Ia berharap kehadiran teknologi mutakhir ini juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM, agar benar-benar menghadirkan kemanfaatan sosial yang luas. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna dan pasar teknologi dari luar.

Adies menyampaikan, DPR RI secara kelembagaan berkomitmen mendorong penguatan regulasi dan alokasi pendanaan riset serta inovasi melalui APBN. Selain itu, legislatif juga mendorong percepatan legislasi di bidang kecerdasan

buatan dan teknologi digital.

"AI kini hadir di hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pertahanan. Tapi di sisi lain, AI juga menghadirkan pertanyaan etis dan hukum yang masih butuh jawaban. Kita butuh riset yang mampu memetakan dampak sosial dari teknologi ini," ungkapnya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya integrasi etika teknologi ke dalam pendidikan dan regulasi nasional. Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas disiplin untuk memastikan teknologi tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. "Kita perlu menyusun peta jalan nasional pengembangan AI Indonesia yang holistik dan inklusif," tutupnya. — **azk/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Ancaman Bom Jangan Dianggap Sepele



Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kepada **Parlementaria**, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi serius insiden

pendaratan darurat pesawat jemaah haji maskapai Saudia Airlines di Bandara Kualanamu, Medan, akibat adanya ancaman bom. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam kondisi seperti ini.

"Terkait ancaman bom, tetap harus (prioritaskan aspek) *safety* ya. Setiap maskapai sudah punya standar operasional sendiri, dan kalau situasi memang dianggap mengancam nyawa orang, maka tindakan seperti pendaratan darurat

memang wajib dilakukan," ujar Cucun kepada **Parlementaria**, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6).

Ia menilai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan maskapai dan otoritas bandara sudah tepat. Menurutnya, dalam kasus seperti ini, tidak boleh ada sikap menyepelekan.

"Jangan dianggap main-main. Kalau memang perlu pengecekan oleh tim ahli bom, ya harus dilakukan. Apalagi kalau sudah menyangkut ancaman bom, harus betul-betul diantisipasi," tegas politisi PKB itu.

Lebih lanjut, Cucun juga mendorong aparat penegak

hukum dan intelijen nasional untuk meningkatkan deteksi dini dan pendekatan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, khususnya dalam momentum krusial seperti ibadah haji.

"Kita minta aparat dan intelijen lebih waspada. Perlu deteksi dini terhadap sosok-sosok yang bisa menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran publik melalui ancaman teror," ungkapnya.

Cucun memastikan bahwa DPR RI akan terus melakukan komunikasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait demi menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh jemaah haji Indonesia.

uf/rdn





Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa saat memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Antisipasi Gelombang PHK Masal

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, angkat bicara terkait kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Saan menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario tersebut menjadi kenyataan. Menurutnya, proyeksi PHK massal yang disampaikan pemerintah harus dijadikan sinyal peringatan serius.

“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” ujar Saan di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Anggaran maupun komisi-komisi terkait di DPR RI untuk menyikapi fenomena ini secara sistematis dan terukur. “Kita harus bisa mencari solusi agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi.

Tujuannya jelas: mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja,” tegasnya.

Saan menekankan bahwa antisipasi tidak hanya cukup dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tetapi harus didukung dengan data konkret dan respons kebijakan yang adaptif. “Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” katanya.

DPR pun siap mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK yang mencakup insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja terdampak.

“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejala sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya. **ssb/rdn**



WFA Bagi ASN Terobosan Positif

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kebijakan sistem kerja berbasis digital atau *Work From Anywhere* (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan terobosan positif di era teknologi dan efisiensi. Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dilandasi dengan perencanaan yang matang dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik.

“Ide dasarnya sangat progresif. Tapi implementasinya tidak boleh serampangan. Harus diuji terlebih dahulu, apakah efektif? Apakah mengganggu koordinasi? Apakah ASN sudah siap secara teknologi dan kompetensi?” ujar Aria Bima kepada **Parlementaria** di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06).

Ia menyoroti perlunya uji coba melalui pilot project di daerah yang sudah memiliki infrastruktur digital memadai seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat. Selain itu, ia juga mendorong perlunya

pelatihan untuk meningkatkan literasi teknologi para ASN.

“Jangan sampai ASN hanya bisa menggunakan Zoom saja. Tapi begitu harus menjalankan sistem kerja digital yang kompleks, mereka kesulitan. Perlu ada pelatihan standar, minimal *threshold* (ambang batas) untuk bisa melaksanakan keputusan Menteri ini,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Aria juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang baik, kebijakan ini justru bisa memperburuk disiplin dan menurunkan produktivitas ASN. Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.

“Mohon maaf, kerja dari kantor saja belum tentu produktif, apalagi kalau dari rumah. Kita harus jujur dan realistis menilai ini. Jangan sampai pelayanan publik terganggu,” katanya. — **rth,gal/rdn**



FOTO: MRP/PDI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat diwawancarai usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/2025).



Penjualan Pulau Langgar Hukum

Menanggapi isu penjualan pulau-pulau Indonesia secara daring, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai praktik tersebut jelas melanggar

hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentu kita akan mendalami lebih jauh ya karena setahu saya sih keberadaan pulau itu kan masuk dalam kawasan konservasi dan itu pasti tidak dibenarkan dan kepemilikan pulau itu harus digarisbawahi sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak boleh seratus persen dimiliki oleh pihak pribadi maupun swasta. Jadi kalau ada yang menjual pulau kita, maka dari segi ketentuan itu melanggar dan pasti bisa berdampak kepada

hukum, karena bagaimanapun kan tidak diperbolehkan,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menambahkan, pihak yang terbukti menjual pulau harus diperiksa. “Ya harus diperiksa, harus dipanggil kalau misalnya memang mereka ada hukum yang apalagi mengatasnamakan pemerintah terus kemudian menjual pulau-pulau itu,” tegasnya.

Ke depan, Komisi II DPR RI akan mendorong pemerintah untuk mempercepat penataan batas administrasi, khususnya di wilayah terpencil, guna menghindari konflik dan kekosongan data wilayah. “Kita akan mendorong pemerintah bagaimana soal penataan kita ke depan ini terkait batas administrasi terutama yang berkaitan di pulau-pulau terpencil itu kita akan selesaikan ke depan dan harus berbasis geospasial, sehingga data kita makin akurat ke depan, batas-batas wilayah itu makin jelas,” tuturnya.

Kepemilikan pulau itu harus digarisbawahi sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak boleh seratus persen dimiliki oleh pihak pribadi maupun swasta

Penataan ini juga dinilai penting mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki kejelasan batas. “Karena selama ini kan memang terjadi pemekaran jadi sehingga itu perlu dibereskan ke depan, karena bukan hanya batas antar provinsi, batas antar desa pun kita akan bereskan ke depan bersama dengan pemerintah baik

itu Kemendagri maupun dengan Menteri ATR BPN,” pungkasnya.

 gal/aha

Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Bahtra Banong saat diwawancara
Parlementaria di Gedung
Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Selasa (24/6/2025).



FOTO: MRI/PDT

Pengawasan Perairan Berbasis Teknologi

Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja ke Pangkalan PSDKP Batam menegaskan pentingnya penguatan peran institusi ini sebagai garda terdepan pengawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis karena menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik. DPR RI mendorong Kementerian Kelautan

Pengawasan laut kita harus masuk ke era digital. Pemanfaatan satellite monitoring, artificial intelligence, hingga drone pengintai



Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot berfoto bersama jajaran Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/6/2025).

dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP untuk melakukan akselerasi transformasi pengawasan berbasis teknologi canggih.

“Pengawasan laut kita harus masuk ke era digital. Pemanfaatan satellite monitoring, artificial intelligence, hingga drone pengintai harus segera diintegrasikan dalam *roadmap* pengawasan PSDKP,” ujar Adrianus Asia Sidot di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/6).

Selain teknologi, Adrianus Asia Sidot juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan TNI AL, Bakamla, dan pemerintah daerah untuk pengembangan dermaga dan pusat kendali operasi.

Tak kalah penting, pelibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta pengadaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan laboratorium forensik juga menjadi rekomendasi utama.

“Pengawasan ini untuk menilai secara langsung infrastruktur sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Batam,” kata Adrianus. **man/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Percepat Pembangunan Infrastruktur di Ketapang



Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah (kanan) saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Ketapang, Sabtu (21/6/2025).

Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya di Kabupaten Ketapang. Ia juga mengatakan bahwa Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang terbesar di Kalimantan Barat dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Pusat.

"Pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Ketapang hari ini dihadiri oleh Bupati Ketapang serta Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Bina Marga bersama jajarannya. Intinya

tadi kami berdialog dengan Bupati Ketapang, di mana Bupati Ketapang menyampaikan mengenai persoalan pembangunan - pembangunan infrastruktur dan transportasi khususnya di Kabupaten Ketapang ini," ucap Yuliansyah di Ketapang, Kalbar, Sabtu (21/6).

Ia mengungkapkan, salah satu sub bahasan yang mencuat adalah mengenai proyek jalan nasional Tayap - Kelik di Kabupaten Ketapang. Jalur jalan Tayap - Kelik merupakan salah satu poros yang dapat menunjang infrastruktur, khususnya dari kabupaten-kabupaten yang lain untuk ke Ketapang.

"Kalau jalan Tayap - Kelik itu terhubung dan jalannya bagus, saya yakin PAD di wilayah Ketapang

ini akan semakin meningkat. Karena akan menambah lapangan - lapangan pekerjaan, sebab Ketapang merupakan pusatnya industri. Oleh karenanya sangat penting adanya perhatian dari pemerintah pusat khususnya untuk pembangunan infrastruktur ini," ujarnya.

Ia meyakini, dengan kondisi Ketapang sebagai pusat industri maka akan banyak investor yang berdatangan di Ketapang. Terutama dengan adanya akses jalur penerbangan yang jauh lebih baik lagi. Yuliansyah berharap, percepatan pembangunan di wilayah Ketapang, khususnya terkait masalah jalan dan juga bandara, bisa cepat terealisasi di 2025 ini. **dep/rdn**



Dorong Diversifikasi dan Hilirisasi Komoditas



Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam agenda Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti capaian positif pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) yang stabil di angka 5,22 persen pada awal tahun 2025, yang mana mendudukkan tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Untuk itu diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor hilirisasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan di masa depan.

"Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh komoditas seperti batu bara, sawit, karet, kopi, hingga tanaman kayu-kayuan. Namun, jangan sampai ketika batu bara habis atau harga sawit jatuh, ekonomi Sumsel ikut merosot," kata Herman di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/6).

Ia menegaskan pentingnya 'exit strategy' terhadap sektor-sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam, terutama pertambangan. Menurutnya, perusahaan-perusahaan seperti PT Bukit Asam dan Inalum harus mulai menghitung valuasi ekonomi dari perspektif lingkungan.

"Jangan sampai eksploitasi jangka pendek seolah-olah

memberikan pendapatan besar, padahal dalam jangka panjang justru merugikan rakyat Sumsel. Valuasi yang memperhitungkan nilai keekonomian jangka panjang dan biaya lingkungan harus dikembangkan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa ketergantungan terhadap komoditas harus mulai dikurangi dan digantikan oleh sektor manufaktur sebagai penopang utama ekonomi daerah. "Komoditas itu idealnya berada di bawah sektor manufaktur. Kalau ada hilirisasi, maka akan ada nilai tambah. Ini membuka lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Ia mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar lebih aktif memberikan pembiayaan kepada sektor manufaktur yang memiliki prospek. "Himbara tahu sektor mana yang punya potensi tapi jangan hanya pasif. Mereka harus ikut mendukung sektor riil," tandasnya. **um/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Dampak Ekonominya Bisa Puluhan Kali Lipat

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika dikelola dengan serius. Menurutnya, investasi yang relatif kecil di sektor ini mampu menghasilkan dampak berlipat ganda terhadap

pendapatan daerah, termasuk bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang saat ini tengah gencar mengembangkan potensi wisatanya.

“Sektor pariwisata itu *leveraging*-nya luar biasa. Kalau diinvestasikan satu miliar, itu bisa kembali seratus kali lipat. Di negara-negara maju seperti Singapura dan Malaysia yang sudah punya *tourism board*, potensi pengaliannya bisa sangat besar,” ujar Hatta di Tanjung Selor, Kaltara, Kamis (19/6).

Lanjutnya, ia mencontohkan bagaimana alokasi dana pariwisata secara nasional yang mencapai Rp3,6 triliun dapat menghasilkan kontribusi sebesar Rp260 triliun terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, rasio tersebut

Pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi penggerak sektor lain seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan transportasi.

menunjukkan potensi yang sama dapat terjadi di daerah, termasuk di Kaltara.

“Artinya ada pengembalian hingga 60 kali lipat. Saya kira di Kalimantan Utara juga bisa seperti itu, karena potensinya sangat lengkap—ada daratan, laut, dan sungai. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* mengelola sektor ini,” jelas Hatta.

Ia menambahkan, pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi penggerak sektor lain seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan transportasi. Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk tidak ragu mengalokasikan anggaran dan membuka peluang investasi pariwisata secara lebih luas.

“Saya melihat langkah Gubernur sudah konkret dan ini harus diperkuat dengan kerja sama semua pihak. Jangan khawatir berinvestasi di sektor ini, karena dampaknya bisa sangat besar dan menyentuh banyak lapisan masyarakat,” tutupnya. **aha**

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (19/6/2025).

FOTO: AHA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pengetatan Aspek Kesehatan Jemaah Jadi Prioritas

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri menyatakan keprihatinan atas tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan Haji 2025. Berdasarkan evaluasi Pemerintah Arab Saudi, angka kematian jemaah haji asal Indonesia mencapai 50 persen dari total kematian jemaah internasional.

Abidin, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII, menilai tingginya angka kematian tersebut

mencerminkan perlunya penguatan aspek kesehatan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami sangat prihatin dan menjadikan isu ini sebagai prioritas,” ujar Abidin kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menegaskan, perlunya pemeriksaan medis dan evaluasi kemampuan fisik jemaah dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Aspek kesehatan jemaah harus benar-benar diperhatikan, baik

saat pra-keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga pemulangan ke Tanah Air, demi keselamatan dan kenyamanan mereka,” tambahnya.

Abidin juga mengungkapkan bahwa Komisi VIII akan mengawal proses revisi regulasi guna mengintegrasikan standar kesehatan yang lebih ketat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Kami juga mendorong Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan haji 2025, serta merumuskan kebijakan preventif yang dapat menekan angka kematian di masa mendatang,” tuturnya.

Ia menegaskan komitmen Komisi VIII untuk memastikan setiap jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga bisa menunaikan ibadah dengan aman dan khususuk.

um/rnm



FOTO: RDN/PDT

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri.



Digitalisasi Sistem Distribusi BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti

masih maraknya praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai aktivitas penyelewengan ini kerap terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu dengan cara menjual solar bersubsidi ke sektor industri.

Menurut Bambang, persoalan ini bermula dari akurasi data penerima subsidi yang belum optimal. Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan energi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Makanya kita ingin melakukan digitalisasi sistem elektronik, bagaimana penyaluran BBM itu bisa terpantau dan tepat sasaran makanya pemutakhiran data itu cukup penting,” ujar Bambang yang ditemui **Parlementaria** usai melakukan pertemuan dengan PT Pertamina dan PT PLN di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/6)

Lebih lanjut, selain mendorong pemutakhiran data pada sistem satu data nasional, ia juga menekan agar penerima bantuan menjadi lebih selektif. Karena itu,

Bambang meminta sinergitas antar-lembaga dan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan juga harus

Kita ingin melakukan digitalisasi sistem elektronik, bagaimana penyaluran BBM itu bisa terpantau dan tepat sasaran

diperkuat. Hal ini semata demi mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

“Ya kita ingin meminta kepada seluruh *stakeholder* baik Pertamina, Kementerian SDM bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum agar BBM Bersubsidi ini tempat sasaran. Kita juga minta kepada BPH Migas selaku badan pengatur hilir agar lebih selektif dalam pendistribusian SPBU-SPBU tidak hanya di Sumut tapi di Nusantara” jelasnya.

—nap/rdn



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, saat melakukan pertemuan dengan PT Pertamina dan PT PLN di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/6/2025).

FOTO: NAP/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Optimalkan Layanan KAI untuk Publik

Dalam rangka memastikan efektivitas fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung implementasi SOP layanan keanggotaan di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kunjungan ini diterima langsung oleh jajaran manajemen PT KAI dengan penuh keterbukaan dan sinergi.

Eko Wahyudi, Anggota BURT DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan bahwa fasilitas protokoler yang diberikan PT KAI kepada DPR RI bukan hanya simbolik, namun juga berperan

dalam memperlancar tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran para anggota dewan, khususnya saat kondisi waktu mendesak.

“Kami ingin memastikan bahwa apa yang telah disusun dalam SOP betul-betul dijalankan di lapangan. Tadi kami lihat langsung dan berdialog dengan pihak KAI, dan hasilnya cukup positif. Respon yang diberikan juga menunjukkan empati dan tanggung jawab,” ujar Eko usai melakukan pertemuan dengan PT KAI di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/6).

Politisi Dapil Jawa Timur IX itu juga menekankan bahwa Jawa Timur

menjadi daerah yang signifikan, mengingat 87 anggota DPR RI berasal dari wilayah tersebut. Ini menjadikan peningkatan pelayanan di jalur dan stasiun di Jawa Timur sebagai salah satu prioritas.

“Masukan kami tadi juga mencakup hal teknis seperti kemungkinan penyediaan gerbong khusus perokok. Hal seperti ini penting demi kenyamanan bersama, selama tidak bertentangan dengan regulasi,” tutupnya.

Ia juga berharap agar kerja sama ini menjadi peluang peningkatan layanan PT KAI, baik bagi anggota DPR RI maupun masyarakat umum.

aar/aha



FOTO: RON/PDT

Anggota BURT DPR RI Eko Wahyudi dalam foto bersama melakukan pertemuan dengan PT KAI di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/6/2025).



Komitmen Lindungi Hak-Hak Minoritas Agama



Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafarez (tengah), dalam forum internasional yang membahas toleransi beragama dan Deklarasi Marrakesh di Roma, Italia, Kamis (19/6/2025).

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafarez, menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak minoritas agama dalam forum internasional yang membahas toleransi beragama dan Deklarasi Marrakesh di Roma, Italia, Kamis (19/6).

Dalam pidatonya, Gilang menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal

lka—kesatuan dalam keberagaman. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap semua pemeluk agama bukan hanya mandat hukum, melainkan keharusan moral yang melekat dalam identitas bangsa.

“Deklarasi Marrakesh bukan sekadar pernyataan, melainkan komitmen untuk bertindak. Mari kita jadikan keberagaman agama sebagai fondasi persatuan, bukan sumber perpecahan,” ujar Gilang.

Deklarasi Marrakesh, yang mengacu pada prinsip-prinsip Piagam Madinah, menekankan perlunya perlindungan terhadap minoritas agama. Hal ini dinilai

selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

Meski mencatat kemajuan dalam membangun harmoni antarumat beragama, Gilang mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan nyata, termasuk diskriminasi, eksklusivitas sosial, dan ketegangan sektarian. Karena itu, Indonesia menekankan perlunya kebijakan afirmatif, pendidikan yang inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat toleransi.

ssb/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: MRO/PDT

Ahmad Heryawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggantikan Netty Prasetyani Aher, dalam rapat pergantian yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, di Gedung Nusantara II, Rabu (25/6/2025).

Ahmad Heryawan Jadi Ketua BAM

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan Ahmad Heryawan sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menggantikan Netty Prasetyani Aher dalam rapat pergantian dan penetapan yang digelar di Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Rapat penetapan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Ketua BAM

sebelumnya serta harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Saan menyampaikan bahwa BAM sebagai garda depan penyalur aspirasi publik memiliki tantangan semakin besar ke depan. Tidak hanya melanjutkan kerja-kerja yang telah dibangun, Ketua baru diharapkan mampu membuka ruang yang lebih luas dalam menjangkau masyarakat dari berbagai daerah.

"BAM harus benar-benar menyiapkan diri. Karena jumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dari waktu ke waktu pasti terus meningkat. Maka BAM

harus menjadi etalase DPR dalam menyerap dan memperjuangkan kepentingan rakyat," lanjutnya.

Ia juga menyinggung dinamika penyampaian aspirasi di era digital, di mana masyarakat semakin aktif memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan keluhan dan tuntutan. "Semuanya (aspirasi) harus ditanggapi dengan serius. Era sekarang sering disebut 'no viral, no justice'. Maka BAM harus menyiapkan berbagai skenario untuk merespons itu secara cepat dan tepat," kata Saan.

Dalam arahnya, Saan menekankan bahwa BAM tidak boleh pasif atau sekadar menunggu. "BAM harus lebih proaktif, tidak hanya melihat, tapi juga harus bergerak cepat untuk menyelesaikan dan menyalurkan aspirasi ke komisi-komisi terkait," ujarnya. **ssb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Laut Harus Jadi Masa Depan Bangsa



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (tengah) bersama para narasumber, akademisi, serta pejabat DPR RI berfoto bersama usai membuka Seminar Nasional dan Bedah Buku di Ruang Abdul Muis, Rabu (25/6/2025).

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya memasukkan valuasi ekonomi sumber daya kelautan ke dalam sistem kebijakan nasional, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ekosistem biru yang berkelanjutan. Demikian hal tersebut disampaikan saat membuka agenda Seminar Nasional dan Bedah Buku 'Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional' di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

Membedah buku karya Nini Subaryana, Indra menyoroti soal potensi besar kelautan Indonesia

yang belum tergarap maksimal. Ia menekankan kebijakan sektor kelautan dan perikanan selama ini cenderung fokus pada produksi dan komoditas. Di sisi lain, jelasnya, jasa ekosistem seperti perlindungan pesisir, cadangan karbon, hingga nilai sosial-budaya belum diperhitungkan secara memadai dalam kerangka ekonomi nasional.

"Di sinilah valuasi ekonomi menjadi pendekatan ilmiah penting untuk melihat potensi laut secara utuh dan komprehensif," tuturnya.

Indra pun turut menambahkan bahwa buku yang dibedah dalam forum tersebut akan menghadirkan kerangka kebijakan berbasis valuasi ekonomi yang dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi DPR, khususnya Komisi IV, dalam

pembahasan revisi ketiga UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi inisiatif Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI yang menggagas forum dialog lintas sek tersebut. Menurutnya, dialog seperti ini mencerminkan komitmen DPR dalam mendorong 'meaningful public participation' dalam proses legislasi.

Dirinya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. "Ini adalah bentuk nyata dari kerja sama multisektor untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan," ujarnya.

um/aha



Juara LOBO II 2025 Diumumkan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi Lomba Orasi Bintang Orator II yang diselenggarakan oleh Bagian TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Acara tersebut menarik perhatiannya karena mengangkat tema Masukan Terhadap Revisi UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Zulfikar mengaku terkesan dengan peserta Lomba Orasi

tersebut. Ia menilai masing-masing peserta yang merupakan pelajar tersebut dapat mengupas isi dari UU ASN dengan baik. Mulai dari persoalan netralitas ASN hingga kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan pratama menjadi wewenang Presiden bagi tingkat daerah berpotensi untuk mereduksi semangat desentralisasi.

Terlebih, tidak hanya jago berbicara sebagai orator, para pelajar peserta Lomba Orasi tersebut juga berbicara berdasarkan data. “Melalui kegiatan ini menjadi

bukti bahwa masyarakat di luar sana dari semua kalangan mengikuti apa yang dikerjakan oleh DPR”, tuturnya dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR, Senin (23/6).

Berdasarkan Keputusan Dewan Juri yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, pemenang Lomba Orasi Bintang Orator – LOBO TV & Radio Parlemen DPR RI dengan tema: ‘Masukan Terhadap Revisi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN’ adalah sebagai berikut;

- Juara 1 : Rizki Ananda, *Fresh Graduate*, Konawe Sulawesi Tenggara
- Juara 2 : Favian Al Abrar Ritonga, Pelajar, Medan
- Juara 3 : Utin Hastari Amalia, *Fresh Graduate SMA*, Ketapang Kalimantan.

tn/rdn



FOTO: MRS/ PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menerima secara simbolis naskah peserta Lomba Orasi Bintang Orator II Tahun 2025 bertema Masukan Terhadap RUU ASN, di Ruang Pemberitaan Parlemen, Gedung DPR RI, Senin (23/6/2025).





FOTO: RSB/PDT

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (tengah) bersama para pejabat di lingkungan Setjen DPR RI berfoto bersama usai meresmikan Kantin Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Kantin Demokrasi Telah Hadir

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan Kantin Demokrasi sebagai salah satu fasilitas representatif bagi Anggota DPR dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Didampingi Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono dan Deputi Bidang Persidangan Suprihartini, ia melakukan pengguntingan pita sebagai soft launching peresmian dibukanya Kantin Demokrasi.

"Kantin Demokrasi ini menjadi pelengkap dari kantin yang sudah

ada, seperti Kantin Risanti, agar kebutuhan dari sisi makanan dapat terpenuhi dengan baik," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/6).

Ia menjelaskan bahwa desain Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas. Selain itu, kualitas makanan juga menjadi perhatian utama, mulai dari kebersihan, cita rasa, hingga keterjangkauan harga.

"Kantin ini akan kita uji coba dalam waktu tiga hingga enam bulan. Jika semuanya berjalan

baik, maka akan kami laporkan kepada Pimpinan DPR untuk dapat diresmikan secara permanen sebagai salah satu fasilitas resmi di kawasan Parlemen," ungkapnya.

Lebih dari sekadar tempat makan, Indra berharap Kantin Demokrasi dapat menjadi sarana interaksi dan komunikasi antar-pegawai maupun anggota DPR. Dengan konsep yang *compact*, tersedia area duduk di luar dan dalam ruangan, memberikan fleksibilitas bagi pengguna.

Indra juga menambahkan bahwa lantai dua Kantin Demokrasi dirancang sebagai ruang kerja fleksibel yang dapat digunakan pegawai untuk WFA (*work from anywhere*) yang dilengkapi fasilitas Wifi. Area ini dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bekerja berbasis kajian atau non-fisik untuk tetap produktif sambil bersantai.

➡ rth,gal/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: EOT/PDT

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Muhammad Najib Ibrahim saat menerima penghargaan bagi Program Parlemen Remaja dalam ajang Indonesia Development Award for Society (IDEAS) 2025, di Jakarta, Kamis (19/6/2025) malam.

Program Parlemen Remaja Raih Penghargaan

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang 'Indonesia Development Award for Society' (IDEAS) 2025. Salah satunya melalui program Parlemen Kampus yang rutin dilaksanakan oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen DPR RI dalam subkategori Sosial.

Program ini dinilai berhasil menjadi wadah pendidikan politik bagi generasi muda. Penghargaan

kedua dan ketiga diraih dalam subkategori Tata Kelola, masing-masing untuk program TVR Parlemen dan DPR Baru Harapan Baru.

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Muhammad Najib Ibrahim menilai penghargaan bagi Program Parlemen Remaja diraih dengan kerja sama tim yang solid untuk terus memberikan yang terbaik untuk mengedukasi pada masyarakat, khususnya remaja untuk kerja-kerja politik DPR.

"Hal itu agar mereka semua

memiliki pemahaman terhadap proses-proses pengambilan kebijakan di DPR RI," jelas Najib kepada **Parlementaria** usai penerimaan penghargaan di Jakarta, Kamis (19/6) malam.

Ia memaparkan program ini akan terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan selera generasi muda. Sehingga, komunikasi-komunikasi yang dilakukan maupun metode-metode yang diperkuat dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya Generasi Z.

"Dan itu interaktif program-programnya lebih melihat bagaimana kebutuhan mereka dan cara mereka berkomunikasi saat sekarang ini yang terus berkembang. Tentu kami akan terus mengembangkan program ini mengikuti perkembangan yang ada saat sekarang ini," pungkasnya.

rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama tim meninjau hasil panen padi dengan metode Sawah Pokok Murah (SPM) di Kabupaten Agam serta mengapresiasi produk unggulan hasil Perhutanan Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (21/6/2025). Foto: TRA/AHA



Beranda Ami



SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)



TVR PARLEMEN